

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahmadi, Takdir, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, Juniarso dan Sodrajat, Achmad Sodik, 2014, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa Cedikia.
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Supriyadi, Bambang Eko, 2011, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Sood, Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnandi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji Sri, 2007,, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mertokusumo, Soedikno, 1996, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam: Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zain, Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Redi,Ahmad, 2014, *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan Untuk Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Gramata Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional pegawai Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2018 Tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas Dan/Atau Informasi Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jurnal

Syarif, Nurhidayat, dan Sutiana, Arif Rusman, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT Surya Panen Subur*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1 No. 1,.

Herlina, Nina, 2015, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3 No. 2.

Nangkoda, Holli Yanti, 2017, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex et Societatis, Vol.V, No.3.

Suhaidi dkk, 2018, *The Readiness Of North Sumatra Regional Government In The Field Of Marine Environment To Realize The World's Maritime Axis On East Coast*, International Journal of Civil Engineering and Technology

Internet

Setapak, *Kamu harus tau! Lembaga-lembaga inilah yang mengurus lingkungan indonesia*, <https://programsetapak.org/setapak-blog/kamu-harus-tahu-lembaga-lembaga-inilah-yang-mengurus-lingkungan-indonesia/>, diakses pada 30 November 2019, Pukul 14:50 WIB.

Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 28 November 2019, Pukul 10:11 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, *Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)*, <http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd#sthash.tTZgbLUI.dpbs>, diakses pada 30 November 2019, Pukul 15:21 WIB.

Ferdila, Asmin, *Rekam Jejak Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan*, <http://ferdinalasmin.blogspot.co.id>, Diakses pada 15 November 2019 Pukul 21:56 WIB.

Fatma, Desy, *Kerusakan Hutan di Indonesia - Macam dan Penyebabnya* <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/kerusakan-hutan>, diakses pada 18 Nobember 2019, Pukul 11:15 WIB.

Musraiono Hohary, Yunelfi, *Karhutla: Pahami Faktor Pendukung, Kerawanannya, Minimalisir Kejadian dan Dampaknya*. <https://www.kompasiana.com/musraiono/5d9ac1d7b13fde46680c7e42/karhutlah-pahami-faktor-pendukung-kerawanannya-minimalisir-kejadian-dan-dampaknya?page=all>, diakses pada 22 November 2019, Pukul 17:30 WIB.

Sani, Abdullah, *6.425 Hektare Lahan Terbakar di Seluruh Riau Sejak Januari 2019*, <https://www.liputan6.com/news/read/4057807/6425-hektare-lahan-terbakar-di-seluruh-riau-sejak-januari-2019>, diakses pada 6 Februari 2019, Pukul 16:45 WIB.

Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Uji Water Container Bombing Untuk Pengendalian Karhutla*, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3505-uji-water-container-bombing-untuk-pengendalian-karhutla.html>, diakses pada 28 Januari 2019 Pukul 17:15 WIB.

Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Strategi Pengendalian Karhutla Tingkat Nasional Daops Se-Indonesia*, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3495-strategi-pengendalian-karhutla-tingkat-nasional-daops-se-indonesia.html>, diakses pada 30 Januari 2019.

Guitarra, Pratama, dan , Husaini, Azis, *Hadapi Karhutla perlu pengawasan kegiatan korporasi dan penegakkan hukum tegas*, <https://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-karhutla-perlu-pengawasan-kegiatan-korporasi-dan-penegakkan-hukum-tegas> Diakses pada 1 Februari 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Strategi* <http://sipongi.menlhk.go.id/manggalaagni/sipongi>, Diakses pada Jum'at 6 Maret 2020 Pukul 10:30 WIB

Gusrina, Desti, *Langkah-Langkah Pemerintah Atasi Kebakaran Hutan*, <https://www.liputan6.com/news/read/4063959/langkah-langkah-pemerintah-atasi-kebakaran-hutan>, Diakses pada 25 Januari 2020 Pukul 17:00 WIB

Evanty, Nukila, 2019, *Tanggung Jawab Pemerintah Pada Bencana Asap* <https://news.detik.com/kolom/d-4707976/tanggung-jawab-pemerintah-pada-bencana-asap> Diakses pada Minggu, 19 Januari 2019 Pukul 23:05 WIB.

Maulana, Anjar, 2015, *“Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan”*, <https://www.kompasiana.com/anjarm0056/5ce2dbdd6b07c510c5734294/p-enanganan-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all>, diakses pada 1 Februari 2020

Irfani, Faisal, *Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang”*, <https://tirto.id/eiD3>, diakses pada 11 Februari 2020 Pukul 14:50 WIB.

Nabilla Tashandra, *Hambatan Penanganan Kasus Karhutla, Mulai dari Biaya Hingga Minimnya Saksi*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/18081021/hambatan.penanganan.kasus.karhutla.mulai.dari.biaya.hingga.minimnya.saksi>. Diakses pada 12 Maret 2020 , Pukul 16:30 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Presiden Instruksikan Pengendalian Karhutla 2021*, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5830/presiden-instruksikan-pengendalian-karhutla-2021>, diakses pada 1 Mei 2021, Pukul 15:20 WIB.

Mongabay, *Greenpeace Nilai Omnibus Law Lemahkan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/30/greenpeace-nilai-omnibus-law-lemahkan-penegakan-hukum-kebakaran-hutan-dan-lahan/> diakses pada 03 Mei 2021 , Pukul 13:00 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Cegah Karhutla, MPA KLHK memperkuat MPA Para Legal*, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5933/cegah-karhutla-klhk-perkuat-mpa-para-legal> diakses pada 1 Mei 2021, Pukul 13:30 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Marsius P. Nainggolan selaku Kasi Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Januari 2020.

Wawancara dengan Martin selaku Analisis Kebakaran pada Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 6 Febuari 2020.

Wawancara dengan Riko Kurniawan selaku Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau via Whatsapp pada tanggal 9 Maret 2020.